

Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia; Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja

Hasna Noor Alifa¹, Agus Sunarya Sulaeman²

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko¹

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia²

Abstract. *This study aims to examine the effect of budget allocation and institutional characteristics on the performance of Public Service Agency Universities. Budget allocation consists of national sources budget, non-tax revenue budget, and foreign loan budget, while institutional characteristics consist of the size of universities, number of teaching staff, and number of students. The national source's budget allocation is then broken down into its types of expenditure: personnel, goods, and capital. Meanwhile, the non-tax budget allocation is broken down into goods expenditure and capital expenditure. The result of the analysis shows that budget allocation is not optimal to support the performance of Public Service Agency Universities. The national source's budget allocation for personnel, goods, and capital expenditures is positively associated with performance. The non-tax revenue budget allocation for goods expenditure is positively associated with performance, while the non-tax revenue budget allocation for capital expenditure and the foreign loan budget is negatively associated with performance. In addition, the size of universities and the number of teaching staff are positively associated with the performance, while the number of students is not associated with the performance of Public Service Agency Universities.*

Keywords; Budget allocation; non-tax revenue; performance; public service agency.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh alokasi anggaran dan karakteristik institusi terhadap kinerja Perguruan Tinggi Negeri berstatus BLU. Alokasi anggaran terdiri dari anggaran rupiah murni, PNBP, dan pinjaman luar negeri, sedangkan karakteristik institusi terdiri dari ukuran perguruan tinggi, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah mahasiswa. Alokasi anggaran rupiah murni kemudian dirinci menurut jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu, alokasi anggaran PNBP dirinci juga menurut jenis belanja, yaitu belanja barang dan belanja modal. Hasil analisis mengindikasikan bahwa alokasi anggaran pada PTN BLU secara umum belum optimal untuk menunjang kinerja PTN BLU. Alokasi anggaran rupiah murni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU. Alokasi anggaran PNBP belanja barang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU. Akan tetapi, alokasi anggaran PNBP belanja modal dan alokasi anggaran pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja PTN BLU. Selain itu, karakteristik institusi berupa ukuran perguruan tinggi dan jumlah tenaga pendidik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU, sedangkan jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap kinerja PTN BLU.

Kata kunci: Alokasi Anggaran; badan layanan umum; kinerja; PNBP.

Corresponding author. Email: nooralifahasma@gmail.com¹, asunarya@pknstan.ac.id²

How to cite this article. Alifa, H. N. & Sulaeman, A. S. (2023), Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia; Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2) 401-416.

History of article. Received: Juni 2023, Revision: Juli 2023, Published: Agustus 2023.

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i2.48827

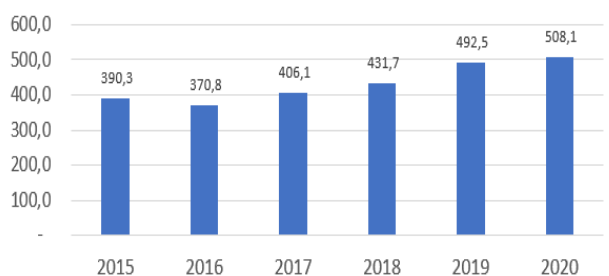
Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara tidak ditentukan oleh sumber daya ekonomi dan sumber daya alam, namun didukung oleh sumber daya manusia, manajemen, dan kebijakan pemerintah (Daniele, 2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan bahwa sumber daya manusia menjadi pendukung pembangunan perekonomian. Dilansir dari siaran pers Kementerian

PPN/Bappenas pada 22 Mei 2017, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yakni penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, menyatakan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran krusial dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang mumpuni untuk dapat menghadapi tantangan bonus demografi (Herlina, 2021).

Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pendidikan (Miliar Rupiah)



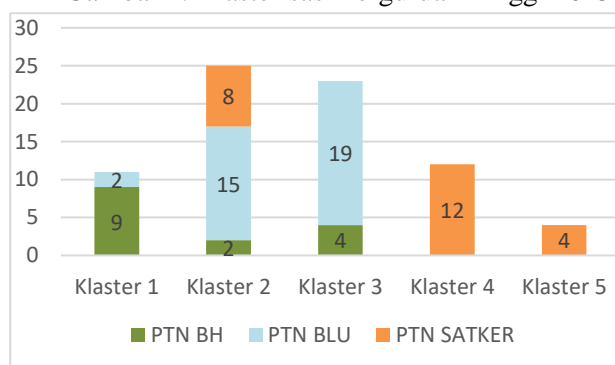
Sumber: Diolah dari Laporan Anggaran Pendidikan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dibentuk dengan menimbang bahwa pendidikan tinggi berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan IPTEK. Keseriusan pemerintah pusat dalam hal pendidikan ditunjukkan dengan ditetapkannya belanja pendidikan sebagai *mandatory spending* sekurang-kurangnya sebesar dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam bentuk dana pendidikan tinggi. Dana tersebut dapat dikelola secara otonom oleh perguruan tinggi. Data alokasi anggaran pendidikan menunjukkan kenaikan anggaran pendidikan secara konsisten sejak tahun 2016.

Sejalan dengan kenaikan anggaran pendidikan, jumlah Badan Layanan Umum terus mengalami kenaikan dan perkembangan, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Donny Maha & Sintong, 2019). Badan Layanan Umum merupakan lembaga yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005). Berdasarkan rumpun layanan, BLU pendidikan berjumlah 101 dari total 244 BLU pada 2020. Perkembangan jumlah Badan Layanan Umum salah satunya disebabkan oleh adanya keinginan Perguruan Tinggi Negeri

(PTN) untuk memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih luas untuk mencapai tujuan pelayanan publik dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa pendidikan yang diberikan. PTN yang belum berstatus sebagai BLU memiliki keterbatasan dalam menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena PNBP yang diterima perlu didaftarkan terlebih dahulu ke rekening kas negara dan dikelola berdasarkan mekanisme APBN. Mekanisme tersebut membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang, sehingga kurang selaras dengan irama kegiatan perguruan tinggi yang harus selalu memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi masyarakat (Fitri, 2012).

Gambar 2. Klasterisasi Perguruan Tinggi 2015



Sumber: Diolah dari Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015

Peningkatan jumlah BLU pendidikan tidak menjamin terwujudnya kualitas pendidikan yang merata pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil klasterisasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada 2015. Klasterisasi perguruan tinggi merupakan pengelompokan perguruan tinggi berdasarkan indikator kualitas kinerja pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, hanya terdapat dua PTN BLU yang termasuk klaster pertama, artinya PTN BLU telah memiliki SDM dan infrastruktur yang kuat untuk mencapai prestasi nasional yang baik. Sementara itu, mayoritas PTN BLU masih berada di klaster dua dan tiga. PTN yang berada pada klaster tersebut memiliki manajemen yang relatif belum optimal untuk mencapai prestasi nasional (Dirjen Dikti, 2020).

BLU memiliki keleluasan operasional yang lebih, namun sangat bergantung pada pendanaan pemerintah. Fleksibilitas berupa kemudahan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kaidah manajemen yang baik untuk memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan idealnya dapat terwujud dengan berkurangnya ketergantungan BLU kepada rupiah murni dari APBN dan meningkatnya kemandirian BLU untuk dapat membiayai operasionalnya sendiri. Akan tetapi, Analisis Kinerja Badan Layanan Umum 2020 memaparkan bahwa BLU memiliki rasio kemandirian sebesar 70,87 persen. Artinya, BLU belum sepenuhnya terlepas dari ketergantungan terhadap pendanaan rupiah murni yang berasal dari APBN.

Fenomena kualitas antar PTN BLU yang belum merata dan masih adanya ketergantungan BLU terhadap pendanaan rupiah murni menandakan bahwa tujuan berubahnya status PTN menjadi BLU belum mampu mendorong peningkatan kinerjanya. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan analisis secara mendalam terkait keberhasilan tujuan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU pada PTN yang dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan. Kinerja PTN BLU tercermin dari sumber pendanaan yang menopang dan karakteristik institusi perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan operasional BLU adalah penerimaan dari APBN, yaitu alokasi anggaran rupiah murni. Fan et al. (2019) mengungkapkan bahwa pendanaan yang bersumber dari pemerintah merupakan penopang utama bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi.

Mutiso et al. (2015) menjelaskan bahwa selain mendapatkan pendanaan dari pemerintah, perguruan tinggi dapat membebaskan biaya kuliah sebagai strategi sumber pendanaan untuk mengimbangi pendanaan pemerintah dan sebagai imbalan atas layanan pengajaran yang didapatkan. Selain itu, disebutkan pula bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh pendanaan selain yang bersumber dari pemerintah maupun

masyarakat. Pada PTN BLU, pendanaan ini dapat berasal dari pinjaman luar negeri. Anggaran pinjaman luar negeri diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan PTN (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2017).

Penelitian yang mengungkapkan hubungan antara sumber pendanaan dan kinerja perguruan tinggi dilakukan oleh Brown (2001); Fan et al. (2019); Goldfarb (2008); Mutiso et al. (2015); dan Omar (2016). Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja perguruan tinggi dilakukan oleh Abduh Idris et al. (2020) dan Muttaqin et al. (2011). Namun, penelitian tersebut belum konklusif karena hanya menggunakan salah satu sumber pendanaan dan salah satu indikator kinerja perguruan tinggi dengan sampel beberapa perguruan tinggi yang telah dianggap mewakili. Oleh karena itu, belum banyak penelitian yang membahas secara khusus mengenai hubungan berbagai jenis alokasi anggaran dan kinerja PTN BLU. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis keterkaitan antara karakteristik institusi dengan kinerja PTN BLU. Penelitian yang mengungkapkan hubungan karakteristik institusi berupa ukuran perguruan tinggi dilakukan oleh Nguyen et al. (2021); Ho dan Peng (2016), dan Amany et al., (2020).

Sementara itu, penelitian yang menguji secara langsung pengaruh jumlah tenaga pendidik dan jumlah mahasiswa terhadap kinerja perguruan tinggi masih belum banyak dijumpai. Variabel tersebut secara terpisah atau bersamaan digunakan sebagai variabel input untuk mengukur efisiensi universitas menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jati (2015); Saputra (2018); Quiroga-Martínez et al. (2018); Figurek et al. (2019); dan Selim dan Bursalioglu (2013). Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah pernah ada karena juga melakukan pengujian langsung karakteristik institusi berupa ukuran perguruan tinggi, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah mahasiswa secara bersamaan terhadap kinerja PTN BLU. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengambil keputusan di bidang anggaran pendidikan pemerintah pusat, pengambil keputusan di bidang pembinaan BLU, dan pengelola PTN BLU dalam rangka mengevaluasi kinerja PTN BLU. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan literatur terkait penelitian kuantitatif di bidang BLU dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh alokasi anggaran dan karakteristik institusi dalam rangka optimalisasi kinerja PTN BLU.

Penelitian ini mengacu pada teori *stewardship* yang didefinisikan oleh Davis et al. (1997) sebagai keadaan ketika manajer tidak memiliki motivasi terkait tujuan pribadi, namun memiliki motivasi terkait tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Poin utama dari teori *stewardship* adalah keselarasan antara tujuan manajer dan tujuan prinsipal (Raharjo, 2007). Walaupun memiliki kebutuhannya sendiri, manajer bertindak secara rasional berdasarkan kepentingan bersama supaya tujuan bersama dapat tercapai. PTN BLU sebagai pengelola sumber daya merupakan *steward*, sedangkan pemerintah pusat selaku pihak yang memiliki sumber daya berupa anggaran merupakan *principal*. Di samping itu, masyarakat juga menjadi *principal* atas penyediaan sumber daya berupa PNBPN melalui biaya pendidikan beserta penyediaan sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi, yaitu dosen dan mahasiswa.

Sumber dana rupiah murni digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari rupiah murni APBN. PTN BLU memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya berupa alokasi anggaran rupiah murni dan memaksimalkan kekayaan tersebut untuk mencapai utilitas berupa kinerja yang maksimal. Berdasarkan penelitian Yi et al. (2015), alokasi anggaran dapat mendorong institusi perguruan tinggi untuk berfokus pada peningkatan indikator kinerja. Sejalan dengan penelitian tersebut, Fan et al. (2019) membuktikan bahwa pendanaan yang bersumber dari pemerintah dapat meningkatkan kinerja penelitian pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, hipotesis

variabel alokasi anggaran rupiah murni dalam penelitian ini yaitu

H_{1a} : Alokasi anggaran rupiah murni belanja pegawai berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

H_{1b} : Alokasi anggaran rupiah murni belanja barang berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

H_{1c} : Alokasi anggaran rupiah murni belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

PNBP pada PTN merupakan penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2001). Perolehan pendanaan yang bersumber dari masyarakat ini menjadikan PTN BLU berposisi sebagai *steward*, sedangkan masyarakat sebagai *principal*. Mutiso et al., (2015) menemukan bahwa kebergantungan perguruan tinggi terhadap pendanaan privat dapat meningkatkan kualitas pengajar dan capaian siswa yang lebih tinggi. Pendanaan privat yang dimaksud bersumber dari biaya pendidikan dan merupakan pendanaan yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan penyediaan jasa Pendidikan (Sulaeman et al., 2019). Dengan demikian, hipotesis variabel alokasi anggaran PNBPN dalam penelitian ini sebagai berikut.

H_{2a} : Alokasi anggaran PNBPN belanja barang berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

H_{2b} : Alokasi anggaran PNBPN belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tujuan dan sasaran strategis terkait pendidikan tinggi. Anggaran pinjaman luar negeri pada PTN BLU digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran RPJM dan sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ekaette et al. (2019) mengemukakan bahwa dana pinjaman luar negeri seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara.

H₃ : Alokasi anggaran pinjaman luar negeri berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

Sebagai *steward*, PTN BLU berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Besaran sumber daya yang dimiliki PTN BLU dapat menunjukkan seberapa besar ukuran PTN BLU. Ukuran sebuah PTN BLU dinilai dapat menunjukkan kemandirian PTN BLU dalam memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk menyediakan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, ukuran menunjukkan legitimasi institusi pendidikan tinggi dalam memanfaatkan sumber daya dan penawaran yang dimiliki untuk mencapai tujuan kerjanya (Ho dan Peng, 2016).

H₄ : Ukuran perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

Pada perguruan tinggi, dosen sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan memiliki tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009). Quiroga-Martínez et al., (2018) menemukan bahwa rasio jumlah tenaga pendidik dengan jabatan fungsional yang tinggi serta rasio jumlah pendidik tetap berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi perguruan tinggi.

H₅ : Jumlah tenaga pendidik berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

Berdasarkan teori *stewardship*, dengan bertambahnya sumber daya yang dimiliki PTN BLU, termasuk sumber daya berupa jumlah mahasiswa, PTN BLU dituntut untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan pemerintah pusat, yaitu mencerdaskan bangsa. Dalam konteks pemerintah daerah, Sundari dan Arza (2021) menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan permintaan efisiensi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap publik.

H₆ : Jumlah mahasiswa berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan regresi linear berganda dengan memakai data panel dalam tiga tahun, yaitu 2017--2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus Badan Layanan Umum. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa alokasi anggaran PTN BLU yang diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing PTN BLU, data-data terkait layanan PTN BLU yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan data terkait jumlah tenaga pendidik yang diperoleh dari Statistik Pendidikan Tinggi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja PTN BLU (*KINERJA*). Kinerja yang digunakan sebagai pengukuran dalam model penelitian ini adalah total skor kinerja aspek pelayanan PTN BLU yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah alokasi anggaran rupiah murni dalam model penelitian ini terdiri dari alokasi anggaran rupiah murni belanja pegawai, alokasi anggaran rupiah murni belanja barang, dan alokasi anggaran rupiah murni belanja modal yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Alokasi anggaran PNBPN dalam model penelitian ini terdiri dari alokasi anggaran PNBPN belanja barang dan alokasi anggaran belanja modal yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Alokasi anggaran pinjaman luar negeri dinyatakan pula dalam satuan miliar rupiah. Karakteristik institusi yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perguruan tinggi yang dihitung menggunakan total aset, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah mahasiswa.

Untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, dibuat model sebagai berikut.

$$KINERJA_{i,t} = \alpha + \beta_1.RMBP_{i,t} + \beta_2.RMBB_{i,t} + \beta_3.RMBM_{i,t} + \beta_4.PNBPBB_{i,t} + \beta_5.PNBPBM_{i,t} + \beta_6.PLN_{i,t} + \beta_7.UKURAN_{i,t} + \beta_8.TENDIK_{i,t} + \beta_9.MHS_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

- $PLN_{i,t}$: alokasi anggaran pinjaman luar negeri PTN BLU i pada tahun t
- $UKURAN_{i,t}$: ukuran perguruan tinggi i pada tahun t
- $TENDIK_{i,t}$: jumlah tenaga pendidik PTN BLU i pada tahun t
- $MHS_{i,t}$: jumlah mahasiswa PTN BLU i pada tahun t
- $\varepsilon_{i,t}$: error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran statistik variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai rata-rata setiap jenis alokasi anggaran berkisar antara 5,7 miliar hingga 223 miliar rupiah. Nilai rata-rata tertinggi adalah alokasi anggaran PNPB belanja barang, sedangkan yang terendah adalah alokasi anggaran rupiah murni belanja modal. Urutan dari rata-rata jenis alokasi anggaran berturut-turut dari tertinggi hingga terendah adalah alokasi anggaran PNPB belanja barang, alokasi anggaran rupiah murni

Keterangan

- $KINERJA_{i,t}$: skor kinerja aspek pelayanan PTN BLU i pada tahun t
- $RMBP_{i,t}$: alokasi anggaran rupiah murni belanja pegawai PTN BLU i pada tahun t
- $RMBB_{i,t}$: alokasi anggaran rupiah murni belanja barang PTN BLU i pada tahun t
- $RMBM_{i,t}$: alokasi anggaran rupiah murni belanja modal PTN BLU i pada tahun t
- $PNBPBB_{i,t}$: alokasi anggaran PNPB belanja barang PTN BLU i pada tahun t
- $PNBPBM_{i,t}$: alokasi anggaran PNPB belanja modal PTN BLU i pada tahun t

belanja pegawai, alokasi anggaran rupiah murni belanja barang, alokasi anggaran PNPB belanja modal, alokasi anggaran pinjaman luar negeri, dan alokasi anggaran rupiah murni belanja modal. Besaran dari rata-rata alokasi anggaran ini secara tidak langsung menunjukkan jenis alokasi anggaran yang lebih menopang kinerja PTN BLU.

Selain itu, statistik variabel kinerja PTN BLU dengan nilai standar deviasi sebesar 5,1 menunjukkan variasi yang tidak terlalu besar. Namun, hal tersebut perlu mendapat perhatian agar pemerataan kinerja PTN BLU di Indonesia menjadi lebih baik. Nilai maksimum dari masing-masing karakteristik institusi, yaitu ukuran perguruan tinggi, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah mahasiswa menunjukkan selisih yang sangat besar antara nilai rata-ratanya. Hal ini menunjukkan adanya variasi nilai yang cukup tinggi antara nilai karakteristik institusi PTN BLU dengan PTN BLU lainnya.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Mean	Max	Min	Std. Dev.
KIN	50,396	59,039	38,840	5,108
RMBP	160,25	250,34	60,25	46,79
RMBB	54,42	177,38	23,48	28,98
RMBM	5,72	32,37	0	7,27
PNPBBB	224,31	820,71	62,94	168,2
PNBPBM	47,38	311,65	0,65	60,47
PLN	13,39	191,54	0	37,81
UKURAN	5.376,98	29.535,02	548,49	6.126,42
TENDIK	1078	2572	153	495
MHS	59.073	1.011.916	12.890	138.665

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan estimasi model dengan *common effect model* yang telah melalui pengujian asumsi klasik, dihasilkan model regresi yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Regresi

Sumber: Data Diolah (2021)

Nilai koefisien *adjusted R²* dalam penelitian ini yang ditunjukkan dalam Tabel 2 adalah 0,598783 atau sebesar 59,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan sebanyak 59,8% variasi variabel dependen, sedangkan sebanyak 40,2% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan regresi dalam penelitian ini.

Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, nilai probabilitas F-statistic adalah 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya variabel-variabel independen pada persamaan tersebut memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Sementara itu, hasil uji signifikansi parsial (uji t) ditunjukkan pada Tabel 3. Nilai probabilitas yang terdapat pada Tabel 3 merupakan nilai probabilitas hasil pengolahan data yang telah dibagi dua. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitas hasil pengolahan data merupakan probabilitas untuk pengujian dua arah (*two-tailed*), sementara itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini merupakan hipotesis yang telah ditentukan arahnya (*one-tailed*), sehingga nilai probabilitasnya perlu disesuaikan dengan cara dibagi dua (Reed & Ye, 2011).

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	Nilai Prob. F One Tailed
RMBP	0,0555*
RMBB	0,0000***
RMBM	0,0000***
PNBPBB	0,0000***
PNBPBM	0,0000***
PLN	0,01795**
UKURAN	0,0000***
TENDIK	0,0509*
MHS	0,1877
***) signifikansi pada $\alpha = 1\%$	
**) signifikansi pada $\alpha = 5\%$	
*) signifikansi pada $\alpha = 10\%$	

Sumber: Data Diolah (2021)

Alokasi Anggaran Rupiah Murni dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran rupiah murni belanja

Dependent Variabel: KINERJA			
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)			
Variabel	Coefficient	t-Statistic	Probability
C	41,91589	37,18511	0,0000
RMBP	0,010665	1,617515	0,1111
RMBB	0,078921	55,55254	0,0000
RMBM	0,064442	3,645333	0,0006
PNBPBB	0,002599	4,509220	0,0000
PNBPBM	-0,014769	-6,316509	0,0000
PLN	-0,010834	-2,146734	0,0359
UKURAN	0,000286	7,752529	0,0000
TENDIK	0,000936	1,662262	0,1018
MHS	-0,0000015	-0,893139	0,3754
R-squared	0,651885	F-statistic	12,27603
Adjusted R-squared	0,598783	Prob (F-stat.)	0,000000

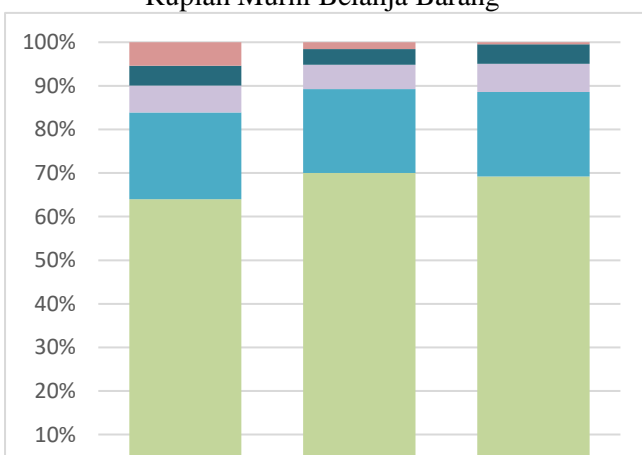
pegawai, belanja barang, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU. Hasil ini sejalan dengan Fan et al. (2019) menyimpulkan bahwa pendanaan dari pemerintah dapat memberikan efek signifikan positif terhadap kinerja inovasi perguruan tinggi serta sejalan dengan Goldfarb (2008) dan Huang et al., (2005) yang menyimpulkan bahwa pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja penelitian perguruan tinggi. Fan et al. (2019) menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan organisasi nonprofit, sehingga pendanaan dari pemerintah merupakan sumber pendanaan utama bagi perguruan tinggi. Pendanaan pemerintah secara positif memengaruhi mekanisme manajemen kelembagaan dan menyebabkan perguruan tinggi dituntut untuk produktif dan memiliki performa terbaik.

Putri (2014) menjelaskan bahwa belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada pegawai sebuah organisasi publik karena telah menggunakan tenaga dan pikirannya untuk menjaga kinerjanya tetap baik dan sejalan dengan tujuan kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi atau imbalan yang diberikan pada seluruh perangkat pegawai PTN BLU atas pekerjaan yang dilaksanakan. Belanja pegawai dapat mendorong produktivitas dan profesionalisme kinerja para pegawai PTN BLU dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan kemahasiswaan, termasuk administrasi mahasiswa.

Selanjutnya, alokasi anggaran rupiah murni belanja barang yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU sejalan dengan hasil penelitian Zebua & Adib, (2014) yang menemukan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan positif kinerja pemerintah daerah dan Badriyah (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja barang memiliki efek signifikan positif indikator kinerja pembangunan daerah. Gambar 3 menunjukkan beberapa proporsi keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh alokasi anggaran rupiah murni belanja barang selama tiga tahun penelitian. Keluaran (*output*) merupakan sasaran suatu kegiatan sebagai hasil pelaksanaan dari satu paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan. *Output* layanan yang dihasilkan berkaitan secara langsung untuk membiayai operasional pelaksanaan program maupun kegiatan PTN BLU. Peningkatan layanan perkantoran akan memberikan efek terhadap kualitas pengajaran oleh tenaga pendidik, pemberian layanan administrasi oleh pegawai, dan mutu kelembagaan perguruan tinggi. Sementara itu, layanan pembelajaran yang semakin memadai akan memengaruhi kualitas belajar mahasiswa dan hasil belajar mahasiswa.

Alokasi anggaran rupiah murni belanja modal yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU sejalan dengan hasil penelitian Lafortune dan Schonholzer (2019) yang menyimpulkan bahwa investasi terhadap fasilitas sekolah dapat meningkatkan nilai ujian siswa, meningkatkan tingkat kehadiran siswa, dan meningkatkan kemauan siswa untuk belajar. Hasil ini juga sejalan dengan Zineldin et al. (2011) yang mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur merupakan faktor penting yang menentukan persepsi mahasiswa atas kualitas sebuah perguruan tinggi.

Gambar 3. Proporsi *Output* Alokasi Anggaran Rupiah Murni Belanja Barang



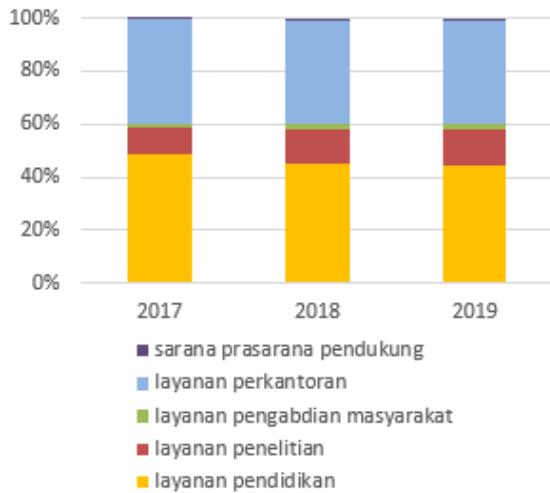
Sumber: Data Diolah (2021)

Infrastruktur yang berkualitas dihasilkan oleh belanja modal melalui penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa fokus belanja modal dari anggaran rupiah murni adalah untuk sarana prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana dapat berupa peralatan praktikum, komputer, peralatan penunjang perkuliahan, meja dan kursi, maupun fasilitas ruang kuliah. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan pembelajaran terlaksana secara lebih berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan PTN BLU.

Alokasi Anggaran PNBPN dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran PNBPN belanja barang berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU, namun alokasi anggaran PNBPN belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja PTN BLU. Hasil ini tidak sejalan dengan Abduh Idris et al. (2020) menemukan bahwa pendanaan perguruan tinggi yang bersumber dari biaya pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akreditasi perguruan tinggi dan Mutiso et al. (2015) yang menyimpulkan bahwa pendanaan dari biaya pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas pendidikan. Gambar 4 menunjukkan proporsi *output* yang dihasilkan oleh alokasi anggaran PNBPN belanja barang.

Gambar 4. Proporsi *Output* Alokasi Anggaran PNBP Belanja Barang
 Sumber: Data Diolah (2021)



Output layanan yang dihasilkan merupakan layanan utama tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh PTN BLU. Layanan pendidikan merupakan jasa utama yang disediakan PTN BLU dan sangat menentukan kualitas lulusan PTN BLU. Layanan penelitian juga termasuk dalam komponen tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan layanan penelitian berkaitan erat dengan kinerja PTN BLU. *Output* layanan pengabdian masyarakat memiliki proporsi rata-rata yang cukup kecil, namun layanan ini berhubungan erat dengan kontribusi nyata sivitas akademisi perguruan tinggi dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Hal ini berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PTN BLU yang digunakan sebagai komponen penilaian kinerja PTN BLU (Carolina, 2020).

Sementara itu, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara alokasi anggaran PNBP dengan kinerja PTN BLU dapat disebabkan oleh beberapa hal. Berdasarkan Tabel 4, selama tiga tahun masa penelitian, rata-rata alokasi anggaran PNBP lebih banyak digunakan untuk belanja barang dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini menandakan bahwa belanja modal lebih banyak didanai dari anggaran rupiah murni. PTN BLU menjadi lebih mengandalkan anggaran rupiah murni untuk mendanai belanja modal, mengingat terdapat

keterbatasan bagi PTN BLU untuk memungut sumbangan pendidikan yang merupakan komponen penerimaan PNBP utama bagi PTN BLU.

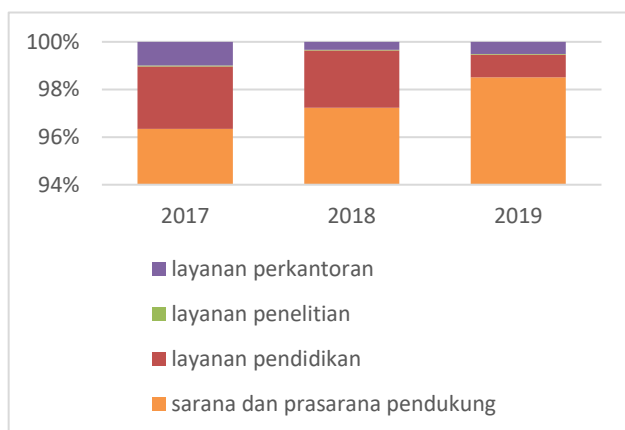
Tabel 4. Rata-rata Alokasi Anggaran PNBP (Miliar Rupiah)

Tahun	PNBP Belanja Barang	PNBP Belanja Modal
2017	207,691	44,349
2018	211,821	42,037
2019	214,414	39,824

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan proporsi *output* yang dihasilkan oleh alokasi anggaran PNBP belanja modal pada Gambar 5, *output* sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan layanan perkantoran memiliki proporsi paling besar terhadap total alokasi anggaran PNBP belanja modal. Pengaruh negatif yang dihasilkan oleh alokasi anggaran PNBP belanja modal juga disebabkan karena prasarana utama sebagai *output* yang telah didanai dari belanja modal anggaran rupiah murni sudah cukup memadai untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara keseluruhan, sehingga adanya alokasi anggaran PNBP untuk belanja modal dengan *output* terbesar yang dihasilkan yaitu sarana dan prasarana pendukung justru memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja PTN BLU. Hal ini dapat disebabkan karena sarana prasarana pendukung pembelajaran dan perkantoran terdiri dari fasilitas-fasilitas yang tidak terkait dengan pelayanan publik, namun hanya bertujuan untuk keindahan lingkungan perguruan tinggi. Pembangunan sarana prasarana tersebut justru dapat menimbulkan inefisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan biaya pemeliharaan.

Gambar 5. Proporsi *Output* Alokasi Anggaran PNPB Belanja Modal



Sumber: Data Diolah (2021)

Martorell et al. (2016) menyatakan bahwa belanja modal memberikan manfaat pada aspek lain, yaitu peningkatan kualitas fasilitas perguruan tinggi yang memberi kenyamanan suasana belajar, namun tidak menghasilkan peningkatan perolehan prestasi mahasiswa maupun mempersempit kesenjangan capaian prestasi antar mahasiswa. Selain itu, terdapat indikasi bahwa belanja modal yang bersumber dari PNPB tidak dapat secara langsung memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini sejalan dengan Hong dan Zimmer (2016) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran sekolah berupa investasi modal tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kompetensi siswa, namun dapat memberikan pengaruh dalam jangka panjang terhadap kompetensi siswa.

Alokasi Anggaran Pinjaman Luar Negeri dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pinjaman luar negeri berpengaruh negatif terhadap kinerja PTN BLU. Selama tiga tahun masa penelitian, rata-rata alokasi anggaran pinjaman luar negeri merupakan yang terkecil dibandingkan dengan alokasi anggaran lainnya. Hal ini juga disebabkan karena masih sedikit PTN BLU yang mendapatkan alokasi anggaran pinjaman luar negeri. Untuk mendapat alokasi anggaran ini, PTN BLU harus melalui tahap penyeleksian dan memiliki tujuan yang selaras dengan kreditur maupun Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ekaette et al. (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara utang pihak luar dengan kualitas pendidikan di sebuah negara. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Setiawan (2019) yang membuktikan pengaruh negatif antara utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai indikator kinerja negara.

Setiawan (2019) menjelaskan bahwa utang luar negeri menimbulkan beban ekonomi bagi peminjam pada saat jatuh tempo pembayaran. Selain itu, utang luar negeri menyebabkan ketergantungan peminjam terhadap kreditur dan kurangnya keleluasaan arah kebijakan karena harus selaras dengan tujuan kreditur. Oleh karena itu, alokasi anggaran pinjaman luar negeri menimbulkan beban bagi PTN BLU karena dituntut untuk melaksanakan proyek sesuai dengan kesepakatan. Tuntutan ini menimbulkan peningkatan beban kerja bagi pegawai dan pengelola PTN BLU. Hal tersebut berdampak pada pemberian layanan pendidikan yang menjadi kurang optimal.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 2019, terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan proyek yang didanai dari anggaran pinjaman luar negeri. Di antaranya perbaikan desain proyek yang mengakibatkan pelaksanaan proyek tertunda, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan pengadaan lahan yang disebabkan oleh perijinan, pemukiman kembali, atau kurangnya anggaran untuk membayar ganti rugi. Di samping itu, masih terdapat masalah administrasi dan rendahnya kinerja kontraktor dan tenaga kerja. Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut dapat menyebabkan penyelesaian proyek menjadi terlambat dan menimbulkan biaya tambahan yang nilainya dapat lebih besar daripada perencanaan awal. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kinerja PTN BLU secara keseluruhan.

Ukuran Perguruan Tinggi dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amany et al. (2020) yang menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran BLU pendidikan terhadap akreditasi BLU pendidikan dan Ho dan Peng (2016) yang membuktikan pengaruh yang menjadi lebih kuat antara sumber daya dan reputasi terhadap kinerja universitas yang berukuran besar daripada universitas berukuran kecil.

Amany et al. (2020) menjelaskan bahwa instrumen akreditasi berdasarkan Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi mencakup empat dimensi, yaitu mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, mutu dan produktivitas luaran dan capaian, mutu proses, dan mutu input. Ukuran perguruan tinggi yang tercermin oleh total aset mencerminkan sarana prasarana sebagai bagian dari mutu input. Oleh karena itu, perguruan tinggi BLU yang berukuran besar artinya telah memenuhi salah satu syarat penilaian mutu input yaitu kecukupan sarana dan prasarana.

Ukuran PTN BLU yang besar dapat menunjukkan kemapanan sarana dan prasarana yang dimiliki PTN BLU, sehingga dapat menunjang perkembangan kurikulum, sumber daya manusia, mahasiswa, dan dimensi lain yang digunakan dalam menilai akreditasi institusi PTN BLU. Zineldin et al. (2011) mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kepuasan atas kinerja perguruan tinggi dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang berkualitas sebagai sumber daya dasar yang dibutuhkan dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara ukuran perguruan tinggi yang dicerminkan oleh aset terhadap kepuasan mahasiswa juga sejalan dengan penggunaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja layanan BLU pendidikan.

Jumlah Tenaga Pendidik dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik berpengaruh positif terhadap kinerja PTN BLU. Hasil ini sejalan dengan Lenton (2015) yang menemukan bahwa banyaknya jumlah tenaga pendidik sejalan dengan peningkatan kepuasan mahasiswa atas kualitas pengajaran dan lingkungan belajar. Hasil ini juga sejalan dengan Zhang et al. (2017) yang menemukan adanya pengaruh positif antara jumlah tenaga pendidik tetap dengan indeks produktivitas publikasi akademik.

Tenaga pendidik menjadi pihak yang sering terlibat dan memprakarsai kegiatan penelitian, sehingga peningkatan jumlah tenaga pendidik dapat meningkatkan peluang keterlibatan tenaga pendidik dalam menghasilkan publikasi ilmiah. Zhang et al. (2017) mengungkapkan bahwa perguruan tinggi yang memiliki peringkat dan kualitas yang baik merupakan perguruan tinggi yang produktif dalam menghasilkan penelitian. Lenton (2015) menjelaskan bahwa mahasiswa dapat mengalami permasalahan yang disebabkan oleh lingkungan belajar yang kurang kondusif, sehingga berpotensi menghambat proses transfer ilmu pengetahuan dan prestasi akademik mahasiswa. Oleh karena itu, dengan jumlah tenaga pendidik yang lebih memadai, mahasiswa dapat mendapatkan layanan pengajaran melalui jam perkuliahan yang lebih intensif serta memperoleh pembimbingan akademik untuk berdiskusi terkait keinginan atau kendala akademik yang dialami mahasiswa.

Jumlah Mahasiswa dan Kinerja PTN BLU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap kinerja PTN BLU. Hasil ini sejalan dengan Jepsen (2015) yang mengungkapkan bahwa pengaruh jumlah siswa terhadap pencapaian siswa sebagai penentu kualitas sebuah institusi pendidikan dapat berbeda-beda pada berbagai benua tempat institusi pendidikan tersebut berada. Pada negara-negara berkembang, hanya terdapat satu studi di Bolivia yang mampu membuktikan adanya pengaruh positif

antara jumlah siswa dengan pencapaian siswa. Pengaruh yang tidak signifikan ini didukung oleh pernyataan McKrachie dalam Aoumeur (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran sebuah kelas yang ditunjukkan oleh jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap capaian mahasiswa.

Selama tiga tahun penelitian, kenaikan jumlah mahasiswa tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi mahasiswa secara signifikan. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2019, indikator kinerja berupa persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi dan profesi belum mencapai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja program tersebut adalah sebesar 88,78%. Hal ini menandakan perlunya upaya peningkatan kualitas mahasiswa untuk meningkatkan kinerja PTN BLU. Selain itu, masih terlihat adanya ketimpangan kompetensi dan perolehan prestasi antara perguruan tinggi di wilayah barat dan timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas mahasiswa masih perlu ditingkatkan seiring dengan tren peningkatan jumlah mahasiswa agar kinerja PTN BLU semakin baik.

SIMPULAN

Alokasi anggaran rupiah murni yang diperinci menjadi alokasi anggaran rupiah murni belanja pegawai, alokasi anggaran rupiah murni belanja barang, dan alokasi anggaran rupiah murni belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU. Alokasi anggaran PNBPN yang diperinci menjadi alokasi PNBPN belanja barang dan alokasi anggaran PNBPN belanja modal memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kinerja PTN BLU. Alokasi anggaran PNBPN belanja barang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU. Sementara itu, alokasi anggaran PNBPN belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja PTN BLU. Karakteristik institusi berupa ukuran perguruan tinggi dan jumlah tenaga pendidik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja PTN BLU. Namun, karakteristik berupa jumlah mahasiswa tidak berpengaruh terhadap kinerja PTN BLU.

Dengan adanya keterkaitan positif antara alokasi anggaran rupiah murni dan kinerja PTN BLU, pemerintah diharapkan melakukan pembinaan kepada PTN BLU untuk meningkatkan kemandirian guna membiayai kebutuhan operasional, sehingga dapat mengurangi ketergantungan PTN BLU terhadap alokasi anggaran rupiah murni. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggali potensi alternatif lain berupa sumber pendanaan PNBPN dan mengoptimalkan unit-unit pada PTN BLU yang telah mampu menghasilkan PNBPN. Hubungan positif antara alokasi anggaran PNBPN belanja barang diharapkan menjadi pemicu bagi PTN BLU untuk meningkatkan penerimaan PNBPN agar mendorong peningkatan *output* belanja barang. *Output* yang dihasilkan dari belanja barang PNBPN berkaitan langsung dengan layanan utama tridharma perguruan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kinerja PTN BLU secara keseluruhan. Adanya hubungan negatif antara alokasi anggaran PNBPN belanja modal dan kinerja PTN BLU diharapkan menjadi bahan pertimbangan atas penggunaan alokasi anggaran PNBPN untuk belanja modal. Pengawasan terkait penggunaan belanja modal juga diperlukan untuk memastikan bahwa *output* yang dihasilkan mampu memberi peningkatan pada kinerja PTN BLU. Sementara itu, keterkaitan negatif antara alokasi anggaran pinjaman luar negeri dan kinerja PTN BLU diharapkan dapat mendorong sinergi antara pemerintah dengan PTN BLU dalam mengevaluasi kebijakan alokasi anggaran pinjaman luar negeri, baik dari segi perencanaan yang perlu dimatangkan, nilai alokasi yang perlu ditingkatkan, segi pelaksanaan dengan cara menyelesaikan masalah yang menghambat berjalannya proyek, dan dari segi pengawasan yang lebih intensif.

Sementara itu, hubungan positif antara ukuran perguruan tinggi dan kinerja PTN BLU diharapkan dapat mendorong PTN BLU yang berukuran besar untuk menatausahakan aset yang dimiliki secara lebih optimal, khususnya dari segi pemanfaatan dan pemeliharaan. PTN BLU berukuran besar juga diharapkan untuk melakukan desentralisasi tugas untuk

mengantisipasi kompleksitas dan kekakuan organisasi. Keterkaitan positif antara jumlah tenaga pendidik dan kinerja PTN BLU diharapkan dapat mendorong PTN BLU untuk menyediakan jumlah tenaga pendidik yang memadai dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan memberi jaminan bahwa mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang berkualitas secara menyeluruh serta memastikan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang diperlukan mahasiswa.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur terkait kinerja BLU pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa keterbatasan, yaitu penggunaan ruang lingkup BLU pendidikan yang digunakan terbatas pada PTN, rentang waktu yang digunakan adalah tiga tahun, karakteristik institusi dalam penelitian ini hanya diwakili oleh variabel ukuran, jumlah tenaga pendidik, dan jumlah mahasiswa, dan aspek yang dinilai dalam penelitian ini hanya aspek pelayanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah ruang lingkup, merinci dan menambah variabel karakteristik institusi, dan menggunakan indikator lain dalam menilai kinerja PTN BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, M., & Doucouliagos, C. (2003). The efficiency of Australian universities: A data envelopment analysis. *Economics of Education Review*, 22(1), 89–97. [https://doi.org/10.1016/S0272-7757\(01\)00068-1](https://doi.org/10.1016/S0272-7757(01)00068-1)
- Abduh Idris, M., Said, S., Rahman Mus, A., & Kamase, J. (2020). The Effect of Education Costs Through Accreditation of Students' Decisions to Choose Private Universities in Makassar City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(8), 517. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1961>
- Afandi, T. (2017). Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–2.
- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran BLU terhadap Akreditasi BLU Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 78–89.
- Aoumeur, H. (2017). The Impact of Class Size on Teaching and Learning English as a Foreign Language: The Case of the Department of English at Abdelhamid Ibn Badis University. *Arab World English Journal*, 8(2), 349–361. <https://doi.org/10.24093/awej/vol8no2.25>
- Badriyah, S. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap PDRB Jawa Tengah Menggunakan Panel Vector Error Correction Model (PVECM). *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 01(02), 171–178.
- Brown, W. O. (2001). Sources of funds and quality effects in higher education. *Economics of Education Review*, 20(3), 289–295. [https://doi.org/10.1016/s0272-7757\(00\)00017-0](https://doi.org/10.1016/s0272-7757(00)00017-0)
- Carolina, M. (2020). Analisis Kinerja Badan Layanan Umum dan Tantangan BLU 2021. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Daniele, V. (2011). Natural resources and the “quality” of economic development. *Journal of Development Studies*, 47(4), 545–573. <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.506915>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 22(1), 473–500. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>
- Dirjen Dikti. (2020). *Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020*.
- Donny Maha, P., & Sintong, A. (2019). Memahami Badan Layanan Umum Sebagai Ujung Tombak Pemerintah dalam Pelayanan Publik. *Indonesian*

- Treasury Update*, 4(6).
- Ekaette, S. O., Owan, V. J., & Agbo, D. I. (2019). External Debts and the Financing of Education in Nigeria from 1988 – 2018: Implication for Effective Educational Management. *Journal of Educational Realities*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4320606>
- Fan, H. L., Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2019). Do funding sources matter?: The impact of university-industry collaboration funding sources on innovation performance of universities. *Technology Analysis and Strategic Management*, 31(11), 1368–1380. <https://doi.org/10.1080/09537325.2019.1614158>
- Figurek, A., Goncharuk, A., Shynkarenko, L., & Kovalenko, O. (2019). Measuring the efficiency of higher education: Case of Bosnia and Herzegovina. *Problems and Perspectives in Management*, 17(2), 177–192. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(2\).2019.13](https://doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.13)
- Fitri. (2012). *Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII.
- Goldfarb, B. (2008). The effect of government contracting on academic research: Does the source of funding affect scientific output? *Research Policy*, 37(1), 41–58. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.07.011>
- Herlina, N. (2021). Peningkatan Kualitas SDM dan Relevansi Pendidikan Tinggi Melalui Kampus Merdeka. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*.
- Ho, S. S. H., & Peng, M. Y. P. (2016). Managing resources and relations in higher education institutions: A framework for understanding performance improvement. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 16(1), 279–300. <https://doi.org/10.12738/estp.2016.1.0185>
- Hong, K., & Zimmer, R. (2016). Does Investing in School Capital Infrastructure Improve Student Achievement? *Economics of Education Review*, 53, 143–158. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2016.05.007>
- Huang, Z., Chen, H., Yan, L., & Roco, M. C. (2005). Longitudinal nanotechnology development (1991 - 2002): National science foundation funding and its impact on patents. *Journal of Nanoparticle Research*, 7(4–5), 343–376. <https://doi.org/10.1007/s11051-005-5468-3>
- Jati, H. (2015). Penilaian Efisiensi Universitas Lptk Di Indonesia Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1(1), 37–43. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i1.10877>
- Jepsen, C. (2015). Class size: does it matter for student achievement? *IZA World of Labor*, September, 1–10. <https://doi.org/10.15185/izawol.190>
- Kemenristekdikti. (2017). *Kebijakan Alokasi PHLN Kemenristekdikti*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri, (2001).
- Lafortune, J., & Schonholzer, D. (2019). Do School Facilities Matter? Measuring the Effects of Capital Expenditures on Student and Neighborhood Outcomes. *Working Paper, Public Policy Institute of California & Yale University*.
- Lenton, P. (2015). Determining student satisfaction: An economic analysis of the National Student Survey. *Economics of Education Review*, 47, 118–127. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.05.001>
- Martorell, P., Stange, K., & McFarlin, I. (2016). Investing in schools: capital spending, facility conditions, and student achievement. *Journal of Public Economics*, 140, 13–29.

- <https://doi.org/10.1016/j.jpubeo.2016.05.002>
- Mutiso, J. M., Onyango, P. M., & Nyagol, M. (2015). Effects of Funding Sources on Access to Quality Higher Education in Public Universities in Kenya: A Case Study. *International Journal of Business and Social Research*, 5(3), 68–81. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v5i3.738>
- Muttaqin, T., Sulastri, E., Hari, S., & Fachriansyah, K. (2011). *Pendanaan Pendidikan Tinggi* (Issue March 2016). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3719.0809>
- Nasional, B. P. P. (2019). *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Tahun 2019*.
- Nguyen, N. D., Nguyen, T. D., & Dao, K. T. (2021). Effects of institutional policies and characteristics on research productivity at Vietnam science and technology universities. *Heliyon*, 7(1), e06024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06024>
- Omar, S. (2016). *Empirical evidence on the impact of tuition fees on students' satisfaction, value, service quality and recommendation*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Dosen, (2009).
- Putri, S. E. (2014). *Pengaruh belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan jumlah aset tetap daerah terhadap kemampuan keuangan pemerintah kabupaten kota di provinsi sumatera selatan tahun 2008 - 2013*. 8(1), 63–96.
- Quiroga-Martínez, F., Fernández-Vázquez, E., & Alberto, C. L. (2018). Efficiency in public higher education on Argentina 2004–2013: institutional decisions and university-specific effects. *Latin American Economic Review*, 27(1). <https://doi.org/10.1186/s40503-018-0062-0>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Reed, W. R., & Ye, H. (2011). Which panel data estimator should I use? *Applied Economics*, 43(8), 985–1000. <https://doi.org/10.1080/00036840802600087>
- Saputra, R. O. (2018). Efisiensi Universitas Badan Layanan Umum dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Indonesian Treasury Review*, 3(1), 35–42.
- Selim, S., & Bursalioglu, S. A. (2013). Analysis of the Determinants of Universities Efficiency in Turkey: Application of the Data Envelopment Analysis and Panel Tobit Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 89, 895–900. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.952>
- Sulaeman, A. S., Waluyo, B., & Ali, H. (2019). Making dual procurement and supply chain operations: Cases in the Indonesian higher education. *International Journal of Supply Chain Management*.
- Sulaeman, AS, & Sarah Sofi (2022). Efisiensi dan Produktivitas Kinerja Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 365-378. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itr.ev.v7i4.479>
- Sundari, N., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Faktor Non Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia 1,2. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 218–232.
- Yi, P., Kwak, J., & Kim, J. (2015). The impact of performance funding on institutional performance over time: evidence from South Korean universities. *Asia Pacific Education Review*, 16(4), 501–515. <https://doi.org/10.1007/s12564-015-9401-x>
- Zebua, F. W., & Adib, Z. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang

- dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1).
- Zhang, C., Murata, S., Murata, M., Fuller, C. D., Thomas, C. R., Choi, M., & Holliday, E. B. (2017). Factors associated with increased academic productivity among US academic radiation oncology faculty. *Practical Radiation Oncology*, 7(1), e59–e64.
<https://doi.org/10.1016/j.prro.2016.06.012>
- Zineldin, M., Akdag, H. C., & Vasicheva, V. (2011). Assessing quality in higher education: New criteria for evaluating students' satisfaction. *Quality in Higher Education*, 17(2), 231–243.
<https://doi.org/10.1080/13538322.2011.582796>